



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 755/I/2013

III/JANUARI 2013



**DPR Peduli Banjir;
Kunjungi & Beri Bantuan
di Berbagai Daerah**

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JANUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Memasuki minggu ketiga Januari 2013, Kegiatan DPR-RI tetap fokus pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Minggu ini, DPR dipimpin oleh Ketua DPR ikut terjun langsung dalam penanggulangan bencana banjir Jakarta dengan mendirikan Posko Bencana DPR-RI. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Januari 2012.

Pembentukan Posko Banjir DPR-RI

Menghadapi banjir sekarang ini, DPR-RI tidak tinggal diam dan segera membentuk Posko Banjir DPR-RI di arena lapangan tenis *Indoor* DPR-RI.

Posko dilengkapi dengan Tim Kesehatan DPR dan Tim dari Kementerian Kesehatan. Posko menerima sumbangan uang dari intern DPR sekitar 140 Juta Rupiah, Sembako dari berbagai perusahaan termasuk Bank Mandiri, Pertamina, dll. Disamping Posko yang telah terbentuk, Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal telah melakukan peninjauan dan memberikan bantuan langsung ke beberapa daerah.

Selain itu, Pimpinan DPR juga telah bertemu dengan Gubernur DKI dan jajarannya pada 21 Januari, untuk membahas penanganan bencana banjir di Jakarta. Pimpinan DPR mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin bangunan, pembuatan DAM di sepanjang pantai utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri. Moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air. Pimpinan DPR juga mengusulkan, perlunya pembuatan DAM karena proses pemompaan air seperti



yang kini dilakukan kurang efektif, karena memang Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (*rob*) selalu terjadi setiap tahun. Persoalan banjir di DKI juga harus mempertimbangkan solusi jangka panjang, tidak hanya pendek. Masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi, perlu adanya pemikiran relokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri.

Kegiatan DPR lainnya adalah sebagai berikut:

Kegiatan Fungsi Anggaran

Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan agenda: tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012, evaluasi dan serapan pelaksanaan APBN 2012, dan rencana kerja tahun 2013 dilaksanakan tanggal 17 Januari. Rapat ini menyimpulkan antara lain, Komisi IV mengapresiasi serapan APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 91,27% atau sekitar Rp. 5.897.286.683.083,- dari total Pagu APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 6.461.302.077.000,-. Selanjutnya juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih meningkatkan serapan anggaran tahun 2013. Komisi IV juga meminta untuk segera melakukan sosialisasi terhadap UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan menyiapkan tin-

dak lanjut pengaturan yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Komisi IV juga meminta agar Kementerian menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diusulkan ke Komisi IV sesuai ketentuan Pasal 79 UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3. Komisi IV mendukung dan memperjuangkan usulan Kementerian ini untuk memperoleh tunjangan kinerja sesuai dengan persetujuan Menteri PAN dan RB tertanggal 19 Oktober 2012 perihal Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri pada 21 Januari membahas tentang tingkat penyerapan anggaran Kemendagri 2012 sebesar 96,22% (Rp. 16.698.880.388.000,- dari Rp. 17.229.176.084.000,-). Berkenaan dengan hal ini, Komisi II memberikan apresiasi dan selanjutnya meminta agar Kementerian dapat mempertahankannya, bahkan melebihi pencapaian tersebut pada 2013, juga dengan memperhatikan aspek produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Terhadap tingkat penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2012 sebesar 72,19% (Rp. 142.757.486.092,- dari Rp. 197.741.693.000,-), Komisi II meminta BNPB untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga pada tahun 2013, penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Kegiatan Fungsi Pengawasan

Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 Januari dengan agenda pembahasan mengenai kurikulum, menyimpulkan antara lain Mendikbud bersedia untuk menyerahkan gran desain dan dokumen resmi rencana pengembangan kurikulum 2013 yang disertai surat pengantar Mendikbud RI. Seluruh materi paparan dan dokumen resmi kurikulum 2013 merupakan bahan bagi Panja Kurikulum Komisi X untuk melakukan pendalaman dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pada tanggal 14 Januari, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan agenda pembahasan mengenai kurikulum. RDPU ini dilakukan dengan ketua federasi serikat guru Indonesia (FSGI), Majelis Pendidikan Kristen (MPK), dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK). Dalam forum ini mereka masing-masing memberikan paparan berkaitan dengan masalah kurikulum 2013. FSGI menyatakan bahwa kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Kemendikbud melanggar prinsip *good governant*, yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Mendesak Komisi X untuk mencermati strategi dan kebijakan untuk membenahi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik, karena tenaga pendidik merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum.

MPK dan MNPK, memberikan masukan antara lain bahwa materi uji publik yang disampaikan pemerintah mencerminkan bahwa kurikulum 2013 belum memper-

hatikan keberagaman atau *kebhinnekatunggal ikaan* dan tidak memberikan fleksibilitas sekolah untuk mengelola ini, berarti Pemerintah telah melanggar prinsip manajemen berbasis sekolah. Pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap implementasi KTSP (*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*) sejak 2006 sampai saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen kurikulum 2013 belum berdasarkan riset dan evaluasi secara komprehensif dan transparan serta tidak melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Struktur dan isi kurikulum belum memperhatikan tantangan masa depan dan kondisi kekinian secara konsisten, hal ini terlihat dengan adanya penggabungan beberapa pelajaran seperti IPA, IPS dan muatan lokal. Penggabungan ini telah melanggar UU Sisdiknas pasal 37 ayat 1.

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri pada 21 Januari mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2012, rencana aksi pelaksanaan program kegiatan strategis Kementerian/Lembaga TA 2013, pelaksanaan Pilkada 2013 dan 2014, dan penyelesaian pelaksanaan program e-KTP yang belum mencapai target, serta penyediaan DAK-2 serta DP4 untuk Pemilu 2014.

Mengenai pelaksanaan Pilkada 2013 dan 2014, Komisi II meminta kepada Presiden melalui Mendagri untuk menerbitkan Perpu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada bagi kepala daerah yang berakhirmasajabatannya pada 2014 untuk dilaksanakan pada 2013. Terkait hal ini maka usulan Mendagri tentang percepatan penyelesaian RUU Pilkada, Komisi II dapat menyetujuinya.

Pelantikan PAW

Tanggal 22 Januari 2013, telah diambil sumpah sebagai Pengganti Antar Waktu, Herman Kadir SH mewakili Partai Amanat Nasional dari daerah pemilihan Jambi oleh Ketua DPR. Herman Kadir menggantikan H. Chairul Naim M. Anik SH, MM. sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 8/P tahun 2013. Saudara Herman Kadir SH, akan segera duduk di dalam Komisi/Alat Kelengkapan DPR sesuai penunjukan oleh Fraksi Amanat Nasional.

Pengunduran diri sebagai PNS Sekjen DPR

Pada 21 Januari 2013, Sekjen DPR-RI Dra Nining Indra Shaleh Msi. mengajukan surat kepada Pimpinan DPR-RI perihal Pengunduran diri sebagai PNS Sekjen DPR. Sesuai dengan ketentuan UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jo pasal 208 UU No. 27 tahun 2009 dan menyusuli surat tertanggal 15 Januari 2013 perihal pengajuan pensiun, maka Sekjen DPR terhitung mulai tanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS Sekretariat Jenderal DPR-RI. Atas surat ini Pimpinan DPR melakukan rapat

husus dan memberikan persetujuannya. Selanjutnya, pelaksana tugas telah ditunjuk Dr. Winantuningtyastiti Swasanani.

Dalam konferensi pers yang dilakukan 22 Januari, Ketua DPR telah menyampaikan pada publik, yang intinya persetujuan atas permintaan pengunduran diri Sekretaris Jenderal tersebut, dan memberikan penghargaan atas pengabdian dan prestasi yang selama ini dicapai oleh Sekretaris Jenderal dalam memimpin sekretariat jenderal. Beberapa penghargaan telah diperoleh pada kepemimpinannya antara lain: meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan oleh BPK RI tiga tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012); Menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas

keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah, DPR/Setjen telah menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai **BADAN PUBLIK TERBAIK** dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah ditetapkan menjadi model nasional keterbukaan informasi publik.

Ketua DPR mengatakan bahwa, pada tahun pertama kepemimpinannya, lebih banyak mengarahkan kesetiaan untuk benar-benar profesional dalam melaksanakan tugas, mendahulukan kejujuran dan kedisiplinan dan menghindari terjadinya penyelewengan dalam hal pengelolaan anggaran.

**

Ketua DPR Pimpin Langsung Bantu Korban Banjir



Ketua DPR RI Marzuki Alie mengunjungi lokasi korban banjir di desa terisolir Renged dan Kampung Pule, Kecamatan Binuang, Serang Banten.

Banjir telah melanda Jakarta pertengahan Januari ini, terparah sejak 5 tahun terakhir. Banjir ini telah menenggelamkan 41 km² wilayah Jakarta, menelan puluhan korban jiwa, memporakporandakan fasilitas umum dan rumah warga, dan mengakibatkan kerugian materi hingga sekitar Rp. 20 triliun. Menghadapi banjir ini, DPR-RI tidak tinggal diam dan sejak hari pertama banjir, segera membentuk Posko Banjir DPR-RI di arena lapangan tenis Indoor DPR-RI. Posko ini dikomando langsung oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie dengan Ketua Posko Anggota DPR Sofwatillah Mohzaib dan Ketua KORPRI Setyanta Nugraha. Posko Banjir bertugas menampung bantuan dari anggota DPR antara lain dari Fraksi Golkar (dari Ketua Fraksi Setya Novanto), dari Fraksi PDI Perjuangan (Wakil Ketua DPR Pramono Anung), dari Fraksi Partai Demokrat (Ketua DPR Marzuki Alie), urunan karyawan DPR, Sekretariat Jenderal, sumbangan beberapa BUMN, masyarakat

umum dan menyalurkannya ke tempat-tempat penampungan, dan lain-lain, baik secara langsung maupun melalui para relawan.

Posko Peduli Banjir DPR menyiapkan nomor telepon (021) 5715819 yang siap dihubungi setiap saat untuk koordinasi.

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat korban banjir antara lain, bantuan nasi bungkus antara 3.000 sampai 4.000 bungkus per hari, diantar langsung ke rumah-rumah yang terkena banjir. Bingkisan bervariasi, isinya antara lain: Mie instant, beras, gula, kopi, teh, minyak, kecap, air mineral, selimut, handuk, kain sarung, pakaian anak, pakaian dalam wanita, pakaian wanita, mukena, makanan bayi, susu bayi, pembalut wanita, *pampers*, gayung, minuman ringan, sarden, kornet, telur, karpet, celana pendek, kaos.



Ketua DPR Marzuki Alie turun langsung membantu korban banjir, membagi-bagikan bantuan ke berbagai tempat di Jakarta antara lain, Grogol Petamburan, Sumeri I, II, III, IV dan Empang; Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan RW 12, 13 dan 15 Jakarta Utara, Jakarta Utara; Muara Baru, Sunda Kelapa, Posko Ponpes Darul Quro' Kabupaten Tangerang; Posko Ponpes Al-Hidayah, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Serang; Desa Bumi Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat; dan Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Bantuan juga telah disalurkan di Ponpes Modern Nurus Salam Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Karawang. Di Ponpes ini dilakukan pembagian nasi bungkus dan logistik dengan kapasitas penerima 1.000 logistik dan 1.000 nasi bungkus. Tim dari Jaringan Santri Indonesia membantu santri Ponpes membantu membersihkan area sekeliling Ponpes yang mengalami kerusakan parah akibat banjir.

Selain beberapa daerah tersebut, Ketua DPR juga meninjau ke lokasi Desa Telukbango, Kecamatan Batu Jaya sekitar 5 Km dari Ponpes. Hingga banjir surut, Ketua DPR dan Tim relawan sempat terkendala dan belum banyak daerah yang mampu ditembus, terutama wilayah yang terendam banjir akibat jebolnya tanggul Citarum. Korban sekitar 2.000 KK diantaranya

18 rumah hanyut terbawa arus air. Kapasitas penerima 2.000 logistik dan 2.000 nasi bungkus. Untuk daerah Telukbango perlu dihadirkan tim medis lebih awal.

Ketua DPR yang berkordinasi langsung dengan BNPB sempat kesulitan, menurutnya, "BNPB yang menjadi koordinator bantuan, yang memang memiliki anggaran besar justru menjadi lembaga elitis yang tidak mudah dihubungi. Setelah ditelepon berulang kali, mengirim bantuan ala kadarnya tengah malam hari ketiga. Hanya memenuhi syarat saja," katanya.

Setelah Ketua DPR sendiri yang menelpon Kemensos, akhirnya dibantu mengoperasikan dapur umum. Cukup baik kerjasamanya, tetapi kapasitasnya masih terbatas sehingga bantuan tidak maksimal," lanjut Ketua DPR Marzuki Alie.

Selain dari BNPB, di Posko DPR-RI juga dibuat dapur umum dengan bantuan Dharma Wanita dan Jaringan Santri Indonesia (JSI), Kementerian Sosial yang dikelola oleh Relawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana), dan relawan Gerakan Pramuka lintas Racana. Posko dilengkapi dengan Tim Kesehatan DPR dan Tim dari Kementerian Kesehatan. Posko menampung para pengungsi dari Jembatan Besi Jakarta Barat, terutama kaum ibu dan anak-anak.* Foto: Denus/Parle.

Ketua DPR Kunjungi dan Beri Bantuan di Sejumlah Lokasi Banjir



Ketua DPR RI memberikan bantuan kepada salah satu warga korban banjir di Karawang, Jawa Barat.

Selama sepekan Ketua DPR Marzuki Alie memberi perhatian khusus kepada para korban banjir di berbagai wilayah di tanah air sekaligus memberi bantuan kepada korban musibah tersebut. Pada Sabtu dan Minggu (19 dan 20 Januari) Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi istri, Asnawati, mengunjungi daerah banjir di wilayah Jakarta.

Selanjutnya Senin (21/1) Ketua DPR kembali mengunjungi lokasi korban banjir di desa terisolir Renged dan Kampung Pule, Kecamatan Binuang, Serang Banten. Pada hari Selasa (22/1), di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua DPR, Marzuki Alie kembali mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Pada hari Rabu (23/1) lokasi banjir di Kapuk, Jakarta Barat, menjadi obyek kunjungan Ketua DPR dan Kamis (24/1) meski libur nasional Ketua DPR mengunjungi korban banjir di Karawang, Jawa Barat.

Ketika mengunjungi korban banjir di wilayah Se-



Ketua DPR RI saat berdialog dengan korban banjir di Renged, Kecamatan Binuang, Serang, Banten.

rang, Banten, Ketua DPR menyerahkan bantuan yang dihimpun dari sumbangan para anggota DPR dan karyawan di Sekretariat Jenderal DPR diantaranya tenaga kesehatan dan obat-obatan serta kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir kepada penduduk Binuang. “Setelah banjir, dampaknya muncul penyakit. Kami bawa tim dokter, sejak pagi sudah 1.200 orang dilayani sampai siang ini,” kata Marzuki.

Kehadiran Marzuki Alie ke lokasi korban banjir ini dinilai masyarakat tepat sasaran. Pasalnya, hampir 1.000 kepala keluarga di Desa Renged, tempat yang dikunjungi Marzuki pertama kali belum tersentuh bantuan pemerintah.

Jalan menuju desa yang letaknya cukup terpelosok itu nyaris terputus lantaran banjir. Salah satu posko yang menampung banyak warga didirikan di halaman Pondok Pesantren Daar El Qurro, Jalan Raya Cikande-Kresek, Desa Renged, Kecamatan Binuang, Serang, Banten. Posko itu didirikan Jaringan Santri Indonesia (JSI), suatu organisasi yang dibina Marzuki Alie.

Masyarakat menyatakan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Ketua DPR sekaligus bantuan yang diberikan karena sangat dirasakan manfaatnya. “Sudah delapan hari warga mengungsi, tidak hanya ratusan rumah yang terendam, tapi 300 hektare sawah gagal panen. Karena tidak mendapat bantuan, kedatangan Pak Ketua DPR menjadi satu-satunya harapan kami,” ungkap Djahadi, Kepala Desa Renged kepada Marzuki Alie.

Lokasi kedua yang dikunjungi Marzuki Alie yakni Kampung Pule, lebih memprihatinkan lagi. Karena luapan Sungai Cidurian, akses masuk dari Kampung Sasak menuju Kampung Pule terputus, sehingga untuk menjangkaunya harus menggunakan perahu karet. Karena luapan sungai itu pula, berdasarkan informasi yang diterima telah mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Salah seorang warga Masrullah mengeluh sudah 11 hari banjir di kampungnya belum surut sehingga tidak

bisa beraktivitas bertani, bahkan penderitaan semakin bertambah tanaman padi yang sedianya dua bulan mendatang dipanen, hanyut terendam banjir.

Melihat kondisi ini, Ketua DPR Marzuki Alie menyayangkan lambannya pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana di desa tersebut. Dijelaskannya, kunjungan yang dilakukannya merupakan murni sebagai anggota DPR di luar agenda kegiatan resmi DPR.

Sebab, menurut Marzuki, DPR tidak memiliki anggaran untuk penanganan bencana alam karena di luar tugas pokok dan fungsinya. “Ini bantuan sifatnya relawan dari DPR. Urunan dari anggota dan beberapa perusahaan yang peduli,” ungkap Marzuki.

Ketua DPR berharap, Pemda Serang dan Tangerang, Provinsi Banten bersama-sama BPBD untuk benar-benar serius memperhatikan persoalan yang dihadapi warganya. “Semestinya ada kepastian bahwa Pemda bisa menjamin warganya kembali menjalani hidup dengan normal pasca musibah banjir ini,” ujar Marzuki menambahkan.

Sebagai Relawan

Ketua DPR RI Marzuki Alie melanjutkan kunjungan silaturahmi, menyapa korban banjir di Desa Munibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/1/13). Disini ia menemui 1373 KK dari 8 Rukun Tetangga yang wilayahnya telah terendam selama 3 hari, dengan ketinggian air ada yang mencapai sepinggang orang dewasa.

“Kami datang sebagai relawan, bersilaturahmi dengan bapak ibu di sini, sekaligus mengantarkan bantuan yang telah dihimpun dari sebagian anggota DPR, Karyawan Setjen dan donatur yang terketuk hatinya membantu saudara sebangsa yang terkena musibah,” kata Marzuki saat menyampaikan sambutan dihadapan warga yang berkumpul di depan posko kesehatan yang dikelola oleh Tim Posko DPR Peduli Banjir.

Ia menambahkan kunjungannya juga dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



Ketua DPR RI Marzuki Alie menjumpai korban banjir di Jembatan Besi, Jakarta Barat.

dan Kementerian Sosial. “Kalau DPR tidak punya uang untuk kegiatan seperti ini, DPR hanya menyetujui anggaran yang akan disalurkan BNPB, pemerintah termasuk untuk penanganan bencana. Kita lihat apakah anggaran yang telah disetujui digunakan dengan benar,” imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut Marzuki meninjau persawahan milik rakyat yang terendam dan terancam gagal produksi, menyapa tim medis dari klinik DPR yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Ia juga secara simbolis menyerahkan bantuan berupa konsumsi, paket sembako dan selimut.

“Bapak Ibu, yakinlah dibalik musibah selalu ada hikmah dan berkahNYA. Paling tidak hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, kalau tidak banjir belum tentu Ketua DPR bisa datang ke sini ya,” ungkapnya

disambut tepuk tangan warga.

Sementara itu Kepala Dusun Tiga, Desa Munibakti, Sobur menyatakan senang Ketua DPR akhirnya bisa datang. Menurutnya inilah kunjungan pejabat negara yang langsung menyapa warga korban banjir di wilayahnya. “Sebelum ini ada Pak Bupati datang tapi numpang lewat *doang* di kantor desa, pejabat lain belum ada yang berkunjung,” kata dia.

Ia juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian kepada sawah warganya yang sudah terendam selama 3 hari. Petani setempat mengkhawatirkan padi yang baru berusia sebulan tidak akan kuat terendam lama sehingga terpaksa harus diganti dengan bibit baru. Harapannya pemerintah dapat membantu karena pembiayaan proses tanam baru perlu anggaran cukup besar. (as, iky). Foto: Wy/Parle.

Pemindahan Ibukota Bukan Solusi Tuntas



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Mengenai wacana pemindahan ibukota, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. “Setelah banjir ada wacana pemindahan ibukota, ini ‘hangat-hangat tai ayam’. tidak akan menyelesaikan masalah,”ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (22/1).

Menurutnya, DKI Jakarta memiliki problem yang berat. Namun bukan berarti harus memindahkan ibukota. “Solusi untuk mengurai problem Jakarta berada di tangan Gubernur DKI Joko Widodo,”paparnya.

Artinya, lanjut Priyo, lebih baik membuat keputusan yang berani daripada tidak memberikan keputusan apapun terhadap problem

carut marut di DKI Jakarta ini.

“Pemindahan ibukota akan memakan biaya yang sangat mahal. Maka perlu dipikir masak-masak. Lebih baik membenahi infrastruktur kota daripada memindahkan ibukota,”paparnya.

Dia menambahkan, kita harus mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI dalam mengatasi persoalan DKI Jakarta. “Kita lihat sajarah misalnya dengan *Deep Tunnel*, jalur MRT itu merupakan ciri kota modern,”tambahnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, secara kelembagaan Presiden belum memutuskan persoalan pemindahan Ibukota DKI Jakarta ini, Terdapat beberapa opsi diantaranya pertama yaitu pemindahan ibukota, kedua perbaikan DKI Jakarta, kemudian ketiga memindahkan pusat pemerintahan.

“Saya sendiri mempertimbangan DKI ini memiliki nilai historis yang panjang kenapa menjadi sebuah Ibukota Negara. Kita tidak bisa memindahkan ibukota tanpa adanya nilai historis saya agak kurang sepakat namun bila diputuskan untuk pindah tentunya kita akan ikut dan menghargai



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

keputusan itu,”paparnya.

Menurutnya, hal yang harus dibenahi saat ini merupakan pembenahan transportasi, tata ruang wilayah DKI Jakarta. “Ini agak hiruk pikuk dan bukan pekerjaan muda bahkan untuk memindahkan masyarakat sendiri sulit karena sudah sangat demokratis jika dipindahkan maka mereka akan demo,”katanya.

Dia menambahkan, dirinya lebih sependapat perlunya relokasi pusat pemerintahan agar tidak tergabung kedalam pusat industri dan ekonomi. “Coba kita contoh Kuala Lumpur dimana pusat pemerintahannya itu Putra Jaya,”ujarnya. (si) Foto: Parle.

Menpera Tidak Hadir, Komisi V DPR Akan Surati Presiden

Komisi V DPR berencana menyurati Presiden mengenai ketidakhadiran Kemenpera sebanyak empat kali dalam berbagai undangan Rapat Kerja dengan Komisi yang membidangi Perumahan Rakyat, perhubungan tersebut.

Sesuai jadwal Rabu, (23/1), Komisi V DPR direncanakan Raker dengan Kementerian Perumahan Rakyat Djan Faridz membahas mengenai tindak lanjut Hapsem BPK Semester I 2012, dan lanjutan fungsi pengawasan DPR terkait program kegiatan di Kemenpera.

“Ini sudah empat kali Raker Komisi V DPR secara khusus mengundang Kemenpera tapi tidak pernah datang,” terang Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara, Rabu, (23/1).

Menurutnya, DPR telah mengundang Menpera dari tanggal 17, namun beliau berhalangan hadir karena menghadiri acara di DPP REI, berikutnya juga dengan alasan mengikuti sidang kabinet. “Yang terakhir bahkan beliau beralasan mendampingi kegiatan Menkokesra,” jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi V DPR akan segera membahas persoalan ini secara internal guna mengambil keputusan terkait ketidakhadiran Kemenpera yang berulang kali tersebut. “Kita akan putus bersama terkait penundaan kita kali ini,” paparnya.



Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi

Sementara Rumkono (F-PG) mendesak Komisi V DPR segera mengirim surat kepada Presiden perihal ketidakhadirannya tersebut. “Misalnya saja kehadirannya di DPP REI itu sebenarnya bisa diwakilkan,” tegasnya.

Dia mengatakan, harus segera dibuat keputusan secara tertulis dan segera dilaporkan kepada Presiden terkait kinerja Menpera tersebut. “Kita harus buka kepada publik ini, biar masyarakat tahu bagaimana kinerja Menteri Perumahan Rakyat,” katanya. (si/as) foto: iwan armanias/parle.

Perubahan UU MD3 Harus Benar-Benar Berkualitas

Anggota Badan Legislatif DPR RI (Baleg), Buchori Yusuf (F-PKS) menjelaskan mengapa Dewan mengubah UU MD3. Menurutnya, Dewan menginisiatif perubahan UU MD3, semangatnya adalah untuk mereformasi lembaga DPR yang memiliki fungsi terbesar, sebagaimana diamanatkan UUD yaitu membentuk UU.

Hal tersebut disampaikan Buchori saat Rapat Kerja dengan Kementerian PAN/Reformasi Birokrasi terkait masukan bagi pembahasan perubahan UU MD3 yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ana Mu’awanah, di Ruang Rapat Baleg, beberapa hari lalu.

Menurutnya fungsi membentuk UU tersebut belum terlaksana dengan baik dan belum difungsikan dengan baik.

kan dengan baik.

Salah satu hasil kajian, menyatakan karena ada persoalan yang sangat mendasar terkait dengan keparatan. “Inilah relevansinya dengan Kementerian PAN/Reformasi Birokrasi. Posisi yang kemudian dibutuhkan DPR sesungguhnya, secara ruang lingkup berbeda dengan eksekutif,” kata Buchori.

Dijelaskan Buchori, jika eksekutif itu sebagai lembaga pelaksana, sedangkan legislatif merupakan yang memberikan dan membentuk suatu tata aturan yang harus dilaksanakan oleh eksekutif. Dengan demikian, watak dari pekerjaannya pun berbeda. Oleh karena itu, orang yang dibutuhkan pun berbeda.

“Kaitan dengan itu semua, kami memandang



Anggota Badan Legislati DPR Buchori Yusuf.

bahwa ruang yang diberikan hanya ada dua kesempatan sebagaimana paparan dari Kementerian PAN, yaitu PNS dan Pegawai Tidak Tetap. Kami belum melihat bahwa itu bisa mengakomodasi terhadap semangat reformasi keparlemenan kita untuk bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya.

Buchori menilai banyak sekali orang pintar yang masuk PNS, namun kemudian kepintarannya tidak terpakai. Ini mekanisme birokrasi yang panjang yang sebenarnya. Tentunya, kata Buchori, Dewan ini menghindari jebakan-jebakan yang seperti itu.

Kemudian untuk Pegawai Tidak Tetap, timbul pertanyaan bagaimana nasibnya di masa depan. Sementara, DPR ingin meng-hire orang-orang baik dan pintar yang memiliki sifat kontinyu untuk wilayah-wilayah yang mapan dan baik.

“Bagaimana jika DPR ini tidak memiliki sistem kearsipan yang baik, atau jika DPR tidak memiliki lembaga riset yang baik. Kami tidak membayangkan, bagaimana untuk sampai 20 tahun mendatang, kualitas pembuatan UU akan seperti ini,” paparnya.

Mengapa sesungguhnya proses pembuatan perundang-undangan kita sering tumpang tindih, tidak berkualitas dan tidak memberikan solusi kepada publik. Menurut Buchori hal ini karena persoalan-persoalan SDM atau persoalan masalah sistem.

“Kalau setiap masa periode DPR ganti orangnya, kapan kita memiliki DPR yang berkualitas? Padahal posisi legislator itu adalah politisi, bukan praktisi,” imbuhnya.

Artinya politisi, bahwa ketika input kepada DPR tidak berkualitas, otomatis kebijakan yang akan diambil pun tidak berkualitas. “Kami ingin melihat, bagaimana relevansi Kementerian PAN memberikan masukan terkait semangat kami ini. Apakah ruang kami cukup dengan PNS dan Pegawai Tidak Tetap. Adakah ruang lain, dimana dan dalam aturan seperti apa,” katanya.

Jika memang hal ini terkait dengan UU lain, Buchori minta Kementerian PAN menunjukkan UU mana yang harus dirubah. Buchori mengingatkan, bahwa semangatnya adalah bagaimana memberikan ruang bekerja secara profesional, memberikan pelayanan kepada publik yang sesungguhnya.

Sementara, Subyakto (F-PD) menyatakan Perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) harus benar-benar berkualitas. “Jangan sampai UU MD3 ini hanya menyoroti tentang anggota DPR saja, karena secara detail pengawasan anggota dewan, diawasi oleh fraksinya masing-masing,” kata Subyakto.

Sedangkan teman satu fraksi Subyakto, Guntur, menyatakan bahwa UU MD3 juga sedikit banyak mengakomodir kepentingan lembaga negara yang lain, dimana setelah mengalami empat kali perubahan amandemen dimana hak-hak dan wewenangnya menjadi berkurang dengan adanya kedaulatan yang diserahkan sepenuhnya kepada rakyat dan pembagian kekuasaan.

“Jika UU MD3 ini akan mengulang-ulang wewenang yang sudah didistribusikan dalam empat kali amandemen, akan berkepanjangan,” jelasnya. (sc)/foto:iwan armanias/parle.



Anggota Badan Legislati DPR Subyakto.

Masuknya Barang Impor Perlu Diatur Dalam RUU Perdagangan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perdagangan merupakan suatu terobosan terbaru dari pemerintah dalam hal ini khususnya dari Kementerian Perdagangan. Karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan, makanya munculah inisiatif pemerintah untuk membentuk RUU tentang Perdagangan tersebut. Karena sejauh ini, dunia perdagangan di Indonesia masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) milik Belanda.

“Saat ini Komisi VI DPR RI tengah membahas RUU tentang Perdagangan, semua hal yang akan diatur di dalam RUU ini menjadi sesuatu yang urgen karena menjadi bagian yang terakumulatif terhadap semua persoalan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria

Bima (F-PDI Perjuangan) kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, baru-baru ini.

Menurutnya, urgensi RUU tersebut diperlukan untuk memperketat masuknya produk impor ke *market* domestik. Aturan impor ini juga akan menyelamatkan produk dalam negeri. “Ini penting untuk menjaga produk dalam negeri,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa RUU tentang Perdagangan ini tidak dapat mengeluarkan larangan untuk perdagangan bebas. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk membendung barang impor tersebut adalah dengan membuat aturan perdagangan yang akan berdampak pada peningkatan transaksi barang produk dalam negeri dengan memperketat aturan impor.

Dia menambahkan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta aturan karantina bagi produk hortikultura. RUU Perdagangan dipastikan akan mempertegas aturan tersebut sehingga tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia. Artinya, seluruh barang impor yang akan masuk harus memenuhi syarat SNI yang telah diberlakukan oleh pemerintah, tambahnya.

“Kita tidak melarang barang impor masuk ke Indonesia, tetapi kita punya hak untuk mengatur barang impor yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, demi menjaga konsumsi masyarakat pada produk nasional, DPR akan mencermati pasal per pasal yang dituangkan pada RUU tentang Perdagangan ini. “Tidak menutup kemungkinan ada pasal-pasal yang memperbesar arus impor masuk ke dalam negeri melalui RUU ini,” jelasnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX DPR Optimis 2014 BPJS Kesehatan Dapat Dilaksanakan

Tahun 2013 ini adalah sebagai tahun terakhir bagi PT. Askes (Persero) sebelum bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Komisi IX DPR RI kembali mempertanyakan kesiapan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 mendatang.

“Transformasi PT. Askes menjadi BPJS sudah semakin dekat dan tentunya ini akan membludak tiga kali



Anggota Komisi IX DPR Heriyanto.

lipat, PT. Askes harus mempersiapkan dengan timnya dengan ekstra ketat dan hati-hati”, kata Heriyanto, Anggota Komisi IX saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT. Askes yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin (22/1)

Politisi Partai Demokrat ini, mempertanyakan persiapan yang telah dan akan dilakukan PT. Askes dalam upaya persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan mengantisipasi lonjakan peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Heriyanto juga mengeluhkan mengenai adanya obat yang tidak termasuk tanggungan PT. Askes, dimana harganya jauh lebih mahal dan sangat memberatkan masyarakat kurang mampu.

Senada dengan Heriyanto, Oky Asokawati (F-PPP) menyatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat adalah sebagai miniatur implementasi BPJS Kesehatan. Euforia pembebasan biaya kesehatan yang terjadi di Jakarta, jika terjadi secara nasional perlu adanya antisipasi serta persiapan dini dari PT. Askes untuk menangani hal tersebut.

Pasalnya peserta BPJS Kesehatan akan bertambah secara signifikan, kurang lebih 120 juta jiwa. “Angka ini sudah termasuk penerima yang sudah ada di Askes, Jamsostek dan Jamkesda,” papar Oky.

Selain itu, Oky juga mempertanyakan persiapan PT. Askes baik dari segi teknis maupun konsep dalam rangka rencana pengadaan simulasi BPJS di Provinsi Nagroe Aceh Darusalam, Jakarta dan Gorontalo.

Sementara Surya Chandra Surapaty (F-PDIP), menyayangkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait rencana perubahan tersebut. Ia menghimbau agar sosialisasi dapat lebih gencar dilakukan mengingat BPJS Kesehatan tinggal 11 bulan lagi. Namun begitu, ia tetap optimis pelaksanaan BPJS Kesehatan ini dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan teman satu fraksi Surya, Karoline Margret Natasa menghimbau agar transformasi PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan bukan hanya berupa transformasi teknis melainkan juga perubahan semangat.

Caroline menginginkan, DPR dan Pemerintah dapat seirama dan memiliki kesamaan persepsi mengenai BPJS Kesehatan, dalam rangka mewujudkan keadilan di bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.

“Saya secara umum ingin menyoroti bahwa transformasi PT. Askes menjadi BPJS bukan hanya berupa transformasi teknis, teknis perusahaan, teknis pelayanan dan sebagainya. Tetapi semangatnya juga berbeda. Dan kami harap kita punya semangat dan persepsi yang sama terkait dengan BPJS ini”, ujarnya. (sc/ul) Foto: Wy/Parle.

Ketua DPR Marzuki Alie Puji Keberhasilan Sekjen DPR



Sekjen DPR Nining Indra Saleh dengan Ketua DPR Marzuki Alie.

Ketua DPR Marzuki Alie memuji keberhasilan Sekjen DPR Nining Indra Saleh di masa kepemimpinan dirinya menjabat Sekjen DPR selama 5 tahun.

Menurut Marzuki, DPR RI telah meraih opini wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI tiga tahun berturut-turut.

“Setjen DPR menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” ujarnya saat konferensi pers menjelaskan pengunduran diri Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (22/1).

Dia menambahkan, DPR atau Sekjen juga menerima penghargaan yang tinggi dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik yang proaktif dalam persiapan, pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, DPR RI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Terbaik dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan ditetapkan menjadi model nasional keterbukaan informasi publik.

DPR atau Sekjen DPR RI telah menerima *award* dari Menteri Keuangan RI atas kinerjanya sangat baik di

bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2011 sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementerian atau lembaga.

DPR juga telah mengadakan layanan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik, pengaduan masyarakat berbasis *online*, dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik berbasis *online*. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IV Berharap Program Bansos Kementerian Pertanian Tepat Sasaran

Komisi IV DPR RI membahas Evaluasi Bantuan Sosial Tahun 2012 dan Rencana Bansos 2013 pada Kementerian Pertanian. Bansos diharapkan terlaksana dengan baik seperti tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dana Bansos ditujukan kepada orang-orang yang miskin, kelompok yang menjadi pionir pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, daerah-daerah yang terkena bencana,” jelas Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, setelah memimpin RDP dengan Sekjen Kementerian Pertanian di Gedung DPR, Selasa (22/1).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, bansos adalah haknya orang miskin jangan ada potongan terutama oleh pelaksana di daerah, “Dinas-dinas harus membantu, bukan kemudian bansos ini bagian dari pendapatan,” katanya.

Sekjen Kementerian Pertanian Heri Priyono menyampaikan bahwa Program Bantuan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp. 5,8 Triliun. (as) Foto: Wy/Parle.



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron (duduk) berdialog dengan pejabat Kementan.

DPR Minta KPU Persiapkan Langkah Terkait Pelaksanaan Pilkada

Terkait pelaksanaan Pemilu yang masa akhir jabatannya pada tahun 2013, Komisi II DPR meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan langkah-langkah penataan penyelenggaraan yang lebih baik.

“Sedangkan untuk pelaksanaan bagi Pemilu yang akhirnya masa jabatannya pada tahun 2014, sesuai dengan keputusan Raker Komisi II DPR dengan Mendagri tanggal 21 Januari 2013 telah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2013 melalui penerbitan Perpu,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1).

Dikeseempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan mengenai penyelenggaraan Pemilu

kada Tahun 2013 dan Pemilu Tahun 2014. Dimana pada tahun 2013, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dijadwalkan akan menyelenggarakan 146 Pemilu, terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wagub pada 15 provinsi dan Pemilu Bupati/Walikota pada 133 Kab/Kota.

“Mengenai pemajuan penyelenggaraan Pemilu yang akhir masa jabatannya tahun 2014 ke 2013, masih banyak daerah yang menanyakan rujukan hukum yang digunakan karena secara eksplisit belum ada rujukan hukum yang mengatur hal tersebut serta menimbulkan banyak tafsir dan perdebatan,” kata Husni.

Ia menjelaskan, pada pasal 233 ayat (2) UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “...

Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akhir masa jabatannya berakhir bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan UU ini paling lama pada bulan Oktober 2008.”

“Karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit hak tersebut, KPU mengambil kebijakan dengan menganalogkan ketentuan yang ada pada UU No.12 tahun 2008 sebagai acuan dan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu yang dimajukan

tersebut,” jelasnya.

Husni menambahkan, bagi daerah yang masa jabatannya bulan November 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 diselenggarakan paling lama bulan Oktober 2013, sehingga pada tahun 2014 sampai akhir penyelenggaraan Pemilu Presiden tidak ada Pemilu karena berkonsentrasi pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. (nt)foto:wy/parle.



Ketua Komisi II DPR Agung Gunanjar Sudarsa memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu.

Komisi IX DPR Desak Kemenakertrans Tertibkan Pemalok TKI di Bandara Soeta



Suasana Raker Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan Kemenakertrans.

Komisi IX DPR RI desak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, agar dapat menertibkan preman dan petugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang memaksa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari luar negeri untuk pulang melalui Terminal IV khusus TKI di Selapajang, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

“Saya minta Menakertrans untuk dapat menertibkan preman yang

ada disana. Petugas dari BNP2TKI yang terbukti terlibat segera dipecat saja dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkap anggota Komisi IX DPR RI Arief Minardi (F-PKS) saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menakertrans beserta jajarannya yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (21/1).

Menurut Arief, percuma Menakertrans mengeluarkan peraturan agar TKI yang baru dari luar negeri tiba di Bandara Soekarno-Hatta bisa langsung pulang ke kampung

halamannya tanpa melalui terminal khusus TKI di Selapajang.

Dia menambahkan, dengan Peraturan Menakertrans (Permenakertrans) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Cara Kepulangan TKI dari negara penempatan secara mandiri ke daerah asal. Peraturan yang dikeluarkan awal Desember 2012 ini berisi, TKI yang pulang dari luar negeri sesampai di Bandara Soekarno-Hatta tidak perlu singgah di terminal khusus TKI di Selapajang.

“Percuma ada peraturan seperti itu,” kata Arief seraya menambahkan kalau preman-preman dan petugas dari BNP2TKI tidak ditertibkan.

Ia minta kepada Kemenakertrans dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk menertibkan kejahatan terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta, harapnya. (iw)foto: iwan armanias/parle.

Pimpinan DPR Dukung Upaya Jokowi Atasi Banjir



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Pramono Anung menerima Gubernur DKI Joko Widodo.

Pimpinan DPR mendukung upaya Gubernur DKI Joko Widodo dalam mengatasi banjir. Selain itu, persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama karena DKI Jakarta merupakan etalase Indonesia.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah baik pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin

bangunan, pembuatan DAM di sepanjang Pantai Utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri.

Menurutnya, moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air.

Marzuki mengusulkan, perlunya pembuatan DAM karena proses pemompaan air seperti yang kini dilakukan kurang efektif. Karena memang Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (rob) selalu terjadi setiap tahun.

“Perlu adanya DAM sepanjang pantai untuk menghalau banjir rob seperti yang ada di Belanda,” katanya sesuai memimpin rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, di Gedung Nusantara III, Senin, (21/1).

Dia menambahkan, persoalan banjir di DKI juga harus mempertimbangkan solusi jangka panjang tidak hanya pendek. “Masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi, kita mengusulkan perlu adanya relokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri,”ujarnya. (si), foto : eka hindra/parle/hr.

DPR Memiliki Tugas Mengawasi Dana Bencana



Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan bantuan korban banjir di Karawang

Ketua DPR RI Marzuki Alie memahami jika banyak anggota DPR RI tidak memberikan bantuan kepada korban banjir di Jakarta saat ini. DPR menurutnya tidak memiliki tugas untuk memberikan bantuan, namun menurutnya banyak warga masyarakat yang hanya tahu meminta bantuan kepada DPR.

“Fungsi dan tugas pokok kedewanan itu hanya legislasi, anggaran dan pengawasan. Jadi tidak ada tugas kedewanan itu memberikan bantuan” kata Ketua DPR saat

memberikan bantuan korban banjir di Karawang, Kamis (23/1).

Dengan ketiga fungsi ini, terutama fungsi pengawasan, maka anggota dewan dari daerah pemilihan yang mereka wakili hanya bisa menegur para pemegang anggaran seperti Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ketua DPR yang didampingi Sekjen, Para Deputi dan pejabat dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR melakukan kunjungan ke lokasi korban banjir ke Pondok Pesantren Modern Nurus Salam Medangasemkecamatan Jayakarta, dengan memberikan bantuan 1.000 bungkus bahan kebutuhan pokok dan 1.000 nasi bungkus.

Kunjungan ke Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, sekitar 5 km dari lokasi pondok pesantren. Lokasi ini yang paling parah,

tepatnya di titik jebolnya tanggul Citarum, korban sekitar 2.000 KK. Diantaranya ada 18 rumah hanyut terbawa arus air. Rombongan DPR yang dipimpin Marzuki Alie memberikan bantuan sebanyak 1.000 bungkus bahan kebutuhan pokok dan 2.000 nasi bungkus. Di daerah ini juga Tim Medis dari Sekretariat Jenderal DPR RI juga dikirimkan untuk membantu korban banjir.

Sekretariat Jenderal DPR RI dengan surat edarannya mengimbau kepada seluruh karyawannya untuk menyumbangkan sedikit dari penghasilannya untuk peduli pada korban banjir. Bantuan juga diperoleh dari Anggota DPR. Sumbangan dari Anggota DPR dan Karyawan Sekretariat Jenderal DPR dikumpulkan di Posko Banjir DPR RI dan selanjutnya disalurkan kepada korban banjir di Jakarta dan sekitarnya. (dd) foto: Denus/Parle.

Pemerintah Diminta Menunda Pemberlakuan Kurikulum Baru 2013



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar.

Komisi X DPR meminta untuk tidak terburu-buru menetapkan dan menyetujui pemberlakuan kurikulum baru 2013. Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar yang akrab dipanggil Mi'ing, pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para praktisi pendidikan Supriyono dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah di Ruang Rapat Komisi X DPR Senayan, Senin (21/1) siang.

Dedi Suwandi Gumelar (Mi'ing) menambahkan, mengingat kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pemerintah pada tahun ini, yang terpenting adalah mensosialisasikan terlebih dahulu bukan serta merta memberlakukan kurikulum tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, sebagai wakil rakyat perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dan cermat untuk menyatakan setuju atau tidak menyetujui, ketika hajat rakyat menjadi mudorot, pastinya DPR akan dipersalahkan oleh masyarakat.

Dia mengemukakan, bahwa masalah kurikulum baru 2013 memang harus ditunda bukan karena masalah konten kurikulum itu sendiri, akan tetapi yang paling mendasar adalah tenaga kependidikan kita yang masih perlu dibenahi karena mereka belum siap.

Kata anggota dewan ini, orang berbondong-bondong ingin menjadi guru hanya karena mengejar tunjangan sertifikasi, padahal sertifikasi tersebut tidak berdasar pada basis kompetensi yang benar. Dia menegaskan kembali kepada pemerintah untuk melakukan penundaan pemberlakuan program kurikulum 2013 yang akan datang, dan meminta untuk memperbaiki tenaga pengajarnya terlebih dahulu.

Dari sekitar 18 ribu guru yang mahir berbahasa Indonesia hanya 30%. "Jadi kalau ada anak siswa yang hanya mampu mendapat nilai matematika 6, mungkin saja karena guru matematikanya juga tidak mahir berbahasa Indonesia. Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi kajian dari Litbang Kemendikbud," tegas Mi'ing. (Spy)/ foto:iwan armanias/parle.

Komisi XI DPR Apresiasi Kinerja Angkasa Pura II



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dipimpin Wakil Ketua Andi Timo Pangerang dengan Dirut Angkasa Pura II.

Komisi XI DPR mengapresiasi kinerja Angkasa Pura II di tahun 2012 dimana membukukan laba sekitar Rp. 1 Triliun. Hal itu mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan Dirut Angkasa Pura II Tri S. Sunoko yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (21/1).

"Kita mengapresiasi kinerja dan pendapatan Angkasa Pura II, namun perlu dibandingkan sejauhmana daya saing *airport* kita dibandingkan *airport* di kawasan Asean, apalagi di Medan itu, nantinya akan bersaing langsung dengan *Airport* Singapura Changi, dan Kuala Lumpur," ujar Anggota DPR Nurdin Tampubolon (F-Hanura) saat RDP berlangsung.

Pada kesempatan itu, Nurdin menyampaikan harapannya agar pembangunan Bandara Silangit, Medan dapat segera selesai dan mampu menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. "Kapan *airport* itu bisa diselesaikan, dan kita ingin tahu sejauhmana *airport* tersebut dapat meningkatkan jumlah wisatawan," ujarnya.

Sementara Dolfie (F-PDIP) mengatakan, Angkasa Pura memiliki 12 bandara namun ternyata tidak semuanya memperoleh laba bagi perusahaan. terdapat beberapa

bandara mengalami kerugian dan harus disubsidi oleh Angkasa Pura II. "Ini sampai kapan disubsidi oleh AP II," ujarnya.

Dari sisi *traffic passenger*, Menurut Dolfi, Indonesia berada pada posisi 10 besar namun kita ingin tahu berapa peningkatan indikator *customer service* Indonesia di dunia. "Benchmarknya apa penghitungan terkait pelayanan terhadap *customer* ini," tanyanya. (si) foto: iwan armanias/parle.

DPR Akan Laporkan Penyelewengan PLN Kepada KPK



Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menegaskan, bila ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang laporan BPK tahun 2009-2010 terkait PLN, hasil Panja nantinya akan dilaporkan kepada KPK.

"Bila ada indikasi hukum kita akan sampaikan hasil laporannya kepada KPK," ujarnya kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (21/1).

Menurutnya, Panja Hulu Sektor Listrik juga akan mengklarifikasi laporan BPK tahun 2009-2010 tentang PLN kepada BP Migas, Rekanan Pengadaan Batubara, Gengset dan Kementerian ESDM, serta PGN.

"Kita banyak mendengar keterlibatan kerabat Dahlan Iskan dalam

berbagai proyek di PLN," ungkapnya. Karena itu, terangya, kita meminta klarifikasi terkait laporan BPK ini.

Dia menambahkan, DPR telah enam kali mengundang Dahlan Iskan namun sampai sekarang dirinya tidak pernah datang ke DPR. "Nanti bila tidak datang lagi maka sesuai Tatib kita akan naikkan persoalan ini ke tingkat Paripurna," ujarnya.

Menurutnya, persoalan kerugian PLN ini dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintahan SBY. "Walaupun bukan kapasitas Dahlan sebagai Meneg BUMN, namun kita tetap meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban Dahlan sebagai mantan Dirut PLN," tambahnya. (si) foto: iwan armanias/parle.

BURT Kunjungi Korban Banjir di Rawajati

Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR RI mengunjungi korban banjir di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Kawasan yang dilewati Sungai Ciliwung ini berada tidak jauh dari Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata. Minggu lalu wilayah padat penduduk ini sempat terendam air hingga ketinggian 3 meter.

"Kawasan terkena banjir di Rawajati ini tidak jauh dari rumah dinas Anggota DPR RI di Kalibata, jadi tentu sebagai tetangga kita harus mengunjungi, bersilaturahmi. Kita lakukan apa yang bisa kita bantu," kata Wakil Ketua BURT Indrawati Sukadis disela-sela kunjungan di RW 07, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/13).

Dalam kesempatan kunjungan yang berlangsung ditengah guyuran hujan tersebut anggota BURT ber-

dialog dengan warga korban banjir, mengunjungi posko dan dapur umum. Sejumlah warga terlihat mulai membersihkan rumah yang sebagian sudah kering dari banjir.

"Setelah banjir sudah surut warga tentu mulai bersih-bersih rumah, jadi kita bantu dengan alat yang memudahkan dalam membersihkan rumah dan halaman dari lumpur dan kotoran sisa banjir," jelas anggota BURT Indah Kurnia. Turut diserahkan sejumlah bantuan lain diantaranya air mineral, kebutuhan bayi dan makanan kering. Bantuan ini disebar di wilayah kelurahan Rawajati seperti di Posko Banjir RW 07, Posko RW 03 di Majelis Taklim Al Hikmah, Posko Kampung Seng dan Posko Kementerian Sosial.

Sementara itu anggota BURT dari FPD Usmawarni

Pieter berharap Pemprov DKI lebih serius menangani pemukiman yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Relokasi menurutnya adalah pilihan yang harus dilakukan dengan tetap mendengar aspirasi warga. "Saya tadi sempat berdialog dengan warga yang tinggal di pinggir kali, katanya dia tidak bersedia pindah ke rumah susun atau kampung deret. Dia memilih diberi kompensasi uang untuk kembali ke kampung," tutur wakil rakyat yang juga anggota Komisi V DPR.

Selama ini menurutnya Pemprov DKI cenderung hanya menawarkan program pembangunan rumah susun atau kampung deret sebagai solusi pemindahan warga yang terlanjur tinggal di bantaran kali. Pilihan itu menurutnya perlu dilengkapi dengan program kembali ke kampung halaman dengan anggaran yang disediakan oleh pemprov, termasuk dana untuk memulai kehidupan baru.

Ketua RW 07 Kelurahan Rawajati, Rudi Partono menyampaikan penghargaan atas kunjungan anggota BURT DPR RI. Ia menjelaskan wilayahnya termasuk

terendam banjir paling parah. "Ada empat Rukun Warga yang terendam banjir di Kelurahan Rawajati, namun yang paling parah dengan ketinggian air sampai 3 meter di RW 07 dan RW 03," jelasnya. Ia mengaku siap mendukung program normalisasi Sungai Ciliwung asalkan warga diajak dialog untuk menemukan solusi terbaik. (iky)



Wakil Ketua BURT DPR Indrawati Sukadis menyerahkan bantuan bagi korban banjir di Posko RW 07 Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan.

DPR Minta Kemendagri Percepat Penyelesaian e-KTP



Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa

Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian sisa pencetakan blangko berbasis chip, personalisasi dan distribusi e-KTP kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Selanjutnya menurut Agun, terkait dengan penyediaan DAK-2 dan DP4 Pemilu 2014 sebagai bahan dasar pemuktahiran data pemilih dan menentukan alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, DPR meminta Kemendagri agar dalam penyediaan data dimaksud dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak ada daerah pemilihan yang dirugikan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Gamawan Fauzi dalam laporannya dihadapan anggota Komisi II menjelaskan penyelesaian pelaksanaan (*progress report*) program e-KTP yang belum mencapai target di akhir Desember 2012, serta penyediaan DAK2 dan DP-4 untuk pemilu tahun 2014.

Berkaitan dengan fisik e-KTP, jelas Gamawan, dari anggaran yang sudah tersedia pada tahun 2012, hanya dimungkinkan untuk membayar fisik e-KTP dengan rincian, Pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah ditatah (*inlay*) sebanyak 144.000.000 keping, Personalisasi sebanyak 76.000.000 keping dan Penerbitan (termasuk distribusi) sebanyak 44.155.952 keping.

Akan tetapi, terang Gamawan, pihak konsorsium PNRI sampai saat ini telah dapat menyelesaikan pekerjaan fisik e-KTP jauh melebihi jumlah fisik yang bisa dibayar tahun 2012, dengan rincian, pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah di *inlay* sebanyak 159.050.000 keping, sehingga terhutang sebanyak 15.050.000, Personalisasi sebanyak 123.643.408 keping, sehingga terhutang sebanyak 47.643.408 keping, Penerbitan (termasuk distribusi) sebanyak 111.796.765 keping, sehingga terhutang sebanyak 67.640.813 keping.

"Dengan demikian, sisa pekerjaan fisik yang harus diselesaikan adalah pencetakan blangko berbasis chip sebanyak 12.965.400 keping, personalisasi sebanyak 48.371.992 keping dan distribusi sebanyak 60.218.635 keping," terangnya.

Jadi, tambah Gamawan, untuk penyelesaian sisa pekerjaan tersebut, telah dilakukan perpanjangan kontrak sampai dengan 31 Oktober 2013 yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi Kemendagri telah meminta kepada konsorsium agar penyelesaian sisa pekerjaan tersebut dapat dipercepat sampai sekitar bulan Juni 2013 atau akhir semester I. (nt), foto : wahyu/parle/hr.

Priyo Terima Masukan Pembentukan TKI Dari Himsataki



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima delegasi Himsataki.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (23/1) siang menerima Delegasi Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) dipimpin Ketuaanya M. Ali Ridho.

Mereka menyampaikan masukan berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja Indonesia, diantaranya, regulasi yang tidak sinkron mengakibatkan sejumlah perusahaan menghentikan kegiatannya.

Selain itu lanjutnya masalah paling *sensitive* masalah TKI adalah perlindungan di luar negeri, kalau terjadi kasus maka sasaran tembak adalah perusahaan pengirim. Masalah moratorium, menurut Himsataki kalau moratorium dibuka kembali maka harus ada perbaikan. Ia mencontohkan setelah moratorium dibuka kembali, TKI yang secara legal dikirim ke Malaysia hanya sekitar 50 orang.

Namun menurut Himsataki, yang masuk secara ilegal atau non procedural mencapai ribuan. Masalah lain yang perlu diperbaiki adalah pelatihan yang selama ini 200 jam perlu ditingkatkan menjadi 400 jam sehingga

kualitas TKI makin meningkat yang pada gilirannya akan menaikkan gaji mereka di luar negeri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan akan menyampaikan masalah itu kepada Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja.

Dia juga mengharapkan hal yang sama hendaknya disampaikan kepada pemerintah yang mempunyai otoritas tentang masalah ketenagakerjaan.

Menanggapi keluhan Himsataki bahwa Menakertrans Muhaimin Iskandar hanya mengakui satu asosiasi perusahaan pengerah tenaga kerja, Priyo Budi Santoso mengatakan secara teoritis pemerintah itu lebih moderat dibanding parlemen.

Kalau ada apa-apa yang berkomentar keras adalah parlemen, misalnya yang mendesak jika menyatakan perang terhadap negara lain adalah parlemen.

Ia menyatakan, Menakertrans tidak boleh bersikap seperti itu, sekarang ini hampir semua asosiasi itu tidak monolitik. Organisasi penasehat hukum juga ada beberapa seperti Peradi, Ikadin, AAI itu adalah hal yang lumrah saja. Yang tidak boleh adalah asosiasi itu memberontak atau makar, sejauh tetap menetapi aturan yang sah tidak pantas, bila pemerintah hanya mengakui satu asosiasi.

Hal itu kata Priyo, justru akan bisa menyulitkan pemerintah sendiri untuk memayungi asosiasi yang ada. "Saya pastikan kementerian yang semacam itu akan mengalami kesulitan dalam mengkonsolidasikan seluruh kepentingan elemen untuk kepentingan pemerintah. Ini kan perusahaan yang baik, mencari rezeki halal-halalan-toyiban. Masalah ini akan saya sampaikan kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar sebab akan membuat keresahan baru yang menyulitkan," kata Priyo menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Perlu Mekanisme yang Lebih Baik untuk Tangani Bencana

Setelah meninjau posko banjir di Rawajati, Pancoran, Tim Komisi VIII DPR RI mengunjungi Posko Banjir Kostrad di Kampung Pulo, RSIA Hermina, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat (18/1).

Rombongan ditemui Kepala SCRP BNPB Mayor Cpt Hasto Widiyatmoko dan Personel Kostrad yang

tergabung dalam SCRPB BNPB. Kunjungan Komisi VIII DPR RI tersebut untuk melihat situasi dan meninjau pelaksanaan penanganan banjir di wilayah Kampung Melayu dan sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Rombongan Komisi VIII DPR RI turun langsung ke lapangan mengecek penyaluran bantuan



Tim Komisi VIII DPR mengunjungi korban banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur.

dan melihat kondisi warga yang mengungsi.

Anggota tim peninjau Soemarjati Arjoso menyoroti tentang kesiapan dan mekanisme penanganan paska bencana. “Seharusnya posko bencana nasional sudah berfungsi. Pusat posko untuk bantuan nasional ini akan baru mulai hari ini atau mungkin besok pagi, dipusatkan di

kantor PU (Kementerian Pekerjaan Umum-red). Alasannya di kantor PU itu komunikasi di seluruh Indonesia ini lebih baik, lancar dan lengkap,” ungkapnya

Tetapi menurut penjelasan ketua posko Cpt Hasto Widiyatmoko, Posko Bencana untuk Pemerintah DKI juga baru akan dibuat. Hal ini disesalkan Komisi VIII. “Sebetulnya

antisipasi bencana banjir ini kan sudah lama, dari data BMKG kan sudah ada dan harusnya diantisipasi bahwa Januari sampai Februari akan banyak hujan besar terus menerus sehingga Jakarta harus waspada banjir. Kenapa poskonya tidak disiapkan lebih awal, sehingga bisa menangani dengan mekanisme yang lebih baik.” ujar Soemarjati. (ray) foto:ry

Komisi III DPR Setujui Delapan Hakim Agung



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan, DPR akhirnya memutuskan dan memilih delapan Hakim Agung yang akan duduk di Mahkamah Agung.

Berdasarkan pemantauan Parlemen, hakim yang memperoleh suara terbanyak yaitu Hamdi, dengan 54 suara, M. Syarifuddin 54 suara, I Gusti Agung Sumanatha 52 suara, Irfan Fachruddin dengan 48 suara, Margono 47 suara, Burhan Dahlan 43 suara, Desnayeti 25 suara, terakhir yaitu Yakup Ginting dengan perolehan 23 suara.

Sementara Hakim Muh. Daming Sunusi tidak memperoleh satu suarapun dari anggota Komisi III DPR paska statementnya “pemerksa dan korban sama menikmati”.

“Selanjutnya nama yang memperoleh suara terbanyak akan kita lanjutkan dalam mekanisme yang berlaku, apakah semua dapat disetujui oleh anggota dewan,” kata Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, di Gedung DPR, Rabu, (23/1). Kemudian anggota Dewan serempak menyatakan “setuju” jawab anggota Komisi III DPR.

Belum Optimal

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek mengakui DPR belum optimal menggali seluruh potensi yang ada saat *fit and proper test* Calon Hakim Agung.

“Kalau melihat waktunya memang sempit jadi kita belum maksimal mengeksplorasi potensi calon hakim agung sebanyak 24 calon tersebut,” paparnya.

Menurutnya, calon yang ada memang cukup berkualitas tetapi harus kita gali semua potensinya. “Memang ada potensi yang terlihat saat *fit and proper test*,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagian juga ada yang mengecewakan misalnya, DPR mempertanyakan ketegasan malah calon hakim agung itu terlihat ragu-ragu. “Seorang hakim agung harus berani mengambil resiko,” katanya.

Berdasarkan pemantauan Parlemen, setelah sempat di tunda untuk rapat internal Komisi III hingga dimulai lagi pukul 15.30 WIB, akhirnya Komisi III DPR mengambil keputusan terkait penetapan Hakim Agung. (sis)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Anna Mu'awanah memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang diwakili Sekjen Kemenpan untuk menghimpun masukan revisi UU MD3. Senin (21/01), foto : iwan armanias/parle/hr.



Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Umum APINDO Sofyan Wanandi terkait masukan bagi pembahasan RUU Perdagangan. Rabu (23/01), foto : iwan armanias/parle/hr.



Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie untuk mendapatkan masukan bagi RUU Migas. Rabu (23/01), foto : iwan armanias/parle/hr.

